

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustinus Hermulyanto, 2019, *Sita Berbasis Nilai Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi.*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Direktorat Hukum, 2021 *Kajian Hukum Seputar Perampasan Aset Dalam Undang-Undang No 10 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Upaya Optimalisasinya*, Catatan Pertama, PPATK, Jakarta.
- Rudi Pardede, 2017, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Cetakan Kedua/edisi Revisi, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sujono, 2020, *Pemulihan Aset Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Gugatan Perdata Negara.*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Theodore S. Greenberg, dkk. 2009, *Stolen Asset Recovery*, Bank Internasional Rekonstruksi dan Pengembangan/Bank Dunia, Washington DC.
- Yunus Husein, *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta.

Hasil Penelitian:

- Risca Aulia Zahra, 2018, Tinjauan Yuridis Mengenai Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Menurut *Non Conviction Based (NCB) Aset Fofeiture* Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Yoana Maria Cherry, 2021, Urgensi Pemberlakuan Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Katolik Prahyangan.
- Yovita Sari Br Taringan, 2022, Penanganan Korupsi Dengan Pencegahan dan Pemulihan Aset Hasil Korupsi, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Jurnal:

- Arizon Mega Jaya, 2017, “Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Cepalo*, Vol/No. 1, Universitas Bandar Lampung
- Ashfa Azkia, 2024, “Problematika Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Melalui Mekanisme Perampasan Aset”, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 03, No. 1, Klikhukum.id.
- Lulu Mufidah, 2021, “Non-Conviction Based Aset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol 9/No.-02, UPN Veteran Jakarta.
- Tasya Anisa, 2024, “Asset Forfeiture through Non-Conviction Based Asset Forfeiture and Management of Criminal Proceeds Assets: A Comparative

Study with the United States and Thailand”, *Pena Justisia*, Vol.23, No. 2, Universitas Indonesia.

Peraturan Perundangan-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134. Sekretariat Negara. Jakarta.

United Nations Conventions Against Corruption (UNCAC)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Conventions Against Corruption*, 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32.

Undang-undang Anti Pencucian Uang 1999 Anti-Money Laundering Act (AMLA) Thailand

Internet:

Adel Andila Putri, 2023, Korupsi Di Indonesia Alami Peningkatan Dalam 3 tahun Terakhir, <https://goodstats.id/article/jumlah-kasus-korupsi-mengalami-peningkatan-dalam-3-tahun-terakhir-UOzDZ> , diakses 9 oktober.

Adnan Pandu Praja, Memberantas Korupsi Secara Terstruktur, Sistemik, Dan Masif, 2023, <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/11/08/memberantas-korupsi-secara-terstruktur-sistematis-dan-masif> ,diakses 27 Oktober 2024.

Annisa, 2024, Perbedaan Vonis Bebas Dan Lepas Pada Hukum Pidana, hlm. 1 <https://fahum.umsu.ac.id/perbedaan-vonis-bebas-dan-lepas-pada-hukum-pidana/#:~:text=Pengertian%20Vonis%20Bebas,membebasikan%20terdakwa%20karena%20kurangnya%20bukti> , diakses 8 November 2024.

Aviva Khalila, KPK: Urgensi Pemberlakuan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Dengan Pendekatan In Rem Dan Tinjauan Pendekatan Serupa Pada Regulasi Unexplained Wealth Di Australia, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/rejuvenasi-kpk-urgensi-pemberlakuan-rancangan-undang-undang-perampasan-aset-dengan-pendekatan-in-rem-dan-tinjauan-pendekatan-serupa-pada-regulasi-unexplained-wealth-di-australia/#:~:text=Urgensi%20pengesahan%20RUU%20Perampasan%20Aset,atau%20setara%20dengan%207%2C83> diakses 27 Oktober 2024.

Lalola Easter, 2023, RUU Perampasan Aset: Setengah Hati Berantas Kejahatan Ekonomi, <https://antikorupsi.org/id/ruu-perampasan-aset-setengah-hati-berantas-kejahatan-ekonomi> diakses 10 Oktober 2024

- Renata Christha Auli, 2024, Jenis-Jenis Korupsi Dan Hukumnya Di Indonesia, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-korupsi-dan-hukumnya-di-indonesia-lt5e6247a037c3a/> Diakses 8 November 2024.
- Sovia Hasanah, 2017, Upaya Hukum Terhadap Putusan Bebas Dan Putusan Lepas, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/upaya-hukum-terhadap-putusan-bebas-dan-putusan-lepas-lt5883597d41474/> , diakses 8 November 2024.
- Teguh Hari Prasetyo, 2023, Korupsi: Ancaman Tersembunyi Yang Merusak Sendi-Sendi Kehidupan Bangsa Dan Negara. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16690/Korupsi-Ancaman-Tersembunyi-yang-Merusak-Sendi-sendi-Kehidupan-Bangsa-dan-Negara.html>, Diakses 10 Oktober 2024

Lain-Lain:

- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2022, “Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset,”.

